



PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALAKA

NOMOR : 3/HK-MOU/IX/ 2024
DPRD.7 Tahun 2024

TANGGAL : 3 September 2024

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Malaka
Alamat Kantor : Jln. Sukabihanawa - Betun

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malaka.

2. a. Nama : Adrianus Bria Seran, S.H.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Malaka
Alamat Kantor : Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah – Betun

- b. Nama : Hendrikus Fahik Taek, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka
Alamat Kantor : Desa Kamanasa, Kec. Malaka Tengah - Betun

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Betun, 3 September 2024

Bupati Malaka
Selaku
Pihak Pertama,

Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malaka
Selaku
Pihak Kedua,

Adrianus Bria Seran, S.H.
Ketua DPRD Kabupaten Malaka

Hendrikus Fahik Taek, S.H.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka

DAFTAR ISI

URAIAN	HALAMAN
Nota Kesepakatan	i-ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS	1 - 29
1.2 Tujuan Penyusunan PPAS	21
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS	22
1.4 Sistematika Penyusunan PPAS	
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH TA. 2025	25 - 29
2.1 Rencana Pendapatan Daerah TA. 2025	26
2.2 Rencana Penerimaan Daerah TA. 2025	28
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	30 - 135
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Malaka Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	30
3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT	65
3.3 Prioritas Pembangunan Kabupten Malaka	95
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BEDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN	135 - 235
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan	135
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	236
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH TA. 2025	238 - 239
BAB VI PENUTUP	240

DAFTAR TABEL

URAIAN	HALAMAN
Tabel 1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Prov NTT Tahun Anggaran	11 - 18
Tabel 1.2 Penjabaran Misi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026	19 - 20
Tabel 1.3 Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2025	21
Tabel 2.1 Proyeksi Penerimaan Daerah Yang Bersumber dari Pendapatan Daerah	28
Tabel 2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah TA.2025	29
Tabel 2.3 Target Penerimaan Daerah Kabupaten Malaka TA.2025	21
Tabel 3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Malaka Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional TA. 2025	31 - 64
Tabel 3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT	68 94
Tabel 3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025	99 -135
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintah Daerah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan TA. 2025	136 -235
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025	236 - 237
Tabel 5.1 Target Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan	238 - 239

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS

Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 merupakan tahap lanjutan dari penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 sebagaimana ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai proses awal dalam penyusunan dokumen APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan penting karena secara substansi, dokumen PPAS memuat program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan. Selain itu, PPAS menjadi gambaran umum dari kebutuhan dan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian layanan kepada masyarakat. Struktur pendanaan yang optimal dapat dicapai apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program dan atau kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (*political will*) dari pimpinan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung jawab, efisien, akuntabel dan transparan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Format penyusunan PPAS

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat Rencana Pendapatan Daerah, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta rencana Pembiayaan Daerah. Selanjutnya dokumen rancangan PPAS tahun 2025 yang telah disusun disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan APBD didahului dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam Pasal 89 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa rancangan PPAS disusun dengan tahapan: 1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 2) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi; 3) menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan 4) menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

1. Menentukan Skala Prioritas Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJPN 2025-2045, disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2024. Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema RKP tahun 2025, maka penekanan pembangunan tahun 2025 berdasarkan RKP tahun 2025 yaitu: 1. SDM Berkualitas untuk mewujudkan SDM Berdaya Saing dan Produktif, 2. Infrastruktur Berkualitas dalam rangka mewujudkan ketersediaan Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas. 3. Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan. Sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Fokus penyusunan RKP tahun 2025 yaitu “pada penguatan fondasi transformasi” penuntasan dan penyelesaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. RPJMN 2020-2024 ini selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Gambar 1.1.
Kerangka Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendukung pemulihan aktivitas produksi, serta peningkatan nilai tambah dan produktivitas dengan mengoptimalkan keterkaitan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan SDM Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yang merupakan salah satu prasyarat dalam upaya pemulihan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Pembangunan SDM pada

tahun 2023 akan ditekankan pada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, pembangunan Science-Techno Park, serta pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.

4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan untuk memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, serta meningkatkan peran kebudayaan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

5) Memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui program prioritas pada pengembangan infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, serta transformasi digital.

6) Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP tahun 2023 difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih tangguh dan adaptif untuk mendukung pemulihan dan transformasi dampak Covid-19 menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Transformasi pasca Pandemi Covid-19 pada pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim akan dititikberatkan pada upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanganan limbah B3 dan peningkatan pemantauan kualitas lingkungan secara otomatis; perbaikan sistem ketahanan bencana yang tanggap terhadap bencana yang bersifat seketika (*sudden onset*) maupun perlahan (*slow onset*); serta pelaksanaan pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rendah emisi gas rumah kaca.

7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Pemulihan ekonomi didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, serta penguatan kerja sama pembangunan internasional untuk pengamanan pasokan vaksin dari negara produsen utama. Hal ini didukung penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia dan keamanan siber. Pada bidang pelayanan publik difokuskan pada penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, tahapan persiapan pemilu akan dimulai dengan verifikasi data Kartu Tanda Penduduk secara online.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional tersebut dan mempertimbangkan berbagai resiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun 2025, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi diproyeksi akan meningkat sebesar 5,3% sampai 5,7%.
2. Tingkat Inflasi diperkirakan sebesar 1,5% sampai 3,5%.
3. Nilai Tukar Rupiah diperkirakan sebesar Rp14.700 sampai Rp15.300 per USD.
4. Proyeksi Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun sebesar 6,49% sampai 6,91%.
5. Harga Minyak Mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD75 hingga USD85 per barel.
6. *Lifting* Minyak Bumi diproyeksi sebesar 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan;
7. *Lifting* Gas sebesar 999 ribu hingga 1.054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan meningkatnya efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dapat membantu menurunkan **Tingkat Pengangguran Terbuka** tahun 2025 pada kisaran 4,5% sampai 5,0%. Sementara **Angka Kemiskinan** diperkirakan akan berada pada rentang 7,0% sampai 8,0%. **Rasio Gini** diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379 hingga 0,382. **Indeks Modal Manusia** pada tahun 2025 juga ditargetkan sekitar 0,56. Selain itu **Penurunan Intensitas Emisi GRK**

ditargetkan pada rentang 38,6.

Prioritas nasional dan fokus pembangunan tahun 2025 tersebut akan dijabarkan dalam program pemerintah tahun anggaran 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan harus mengacu pada tujuan dan sasaran visi misi beserta target pencapaiannya pada tahun 2025 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malaka 2021-2026. Selain itu juga harus memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta keadaan yang sedang terjadi.

2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi.

Penyusunan RPD harus mempedomani beberapa kebijakan nasional maupun kebijakan di masing-masing daerah khususnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setelah ditetapkan, RPD 2024-2026 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan tahunan. menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan RPJPD Provinsi NTT 2005-2025. Selanjutnya dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD) untuk periode tahun 2025 mengacu pada RPD tersebut. Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu: 1) Mewujudkan

masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial; 2) Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; 4) Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Isu-isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan dengan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada dengan harapan segala pembangunan yang dilaksanakan dapat mendukung keharmonisan dan keberlangsungan lingkungan dan ekologi.
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan. Upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan sehingga pengembangan daya saing daerah pada pertumbuhan pendapatan per kapita yang bersumber dari sektor-sektor ini dari tahun ke tahun terus meningkat.
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan Masalah Sosial lainnya. kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Bencana dan perubahan iklim seperti penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa dan hilangnya serapan karbondioksida, memiliki tantangan terhadap pembangunan dalam aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam sistem perencanaan pembangunan sosial. Oleh karena itu Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada.
5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

7. Dampak Covid-19. Dampak domino dari Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur, oleh karena itu perlu ditetapkan langkah-langkah yang komprehensif dalam penanganannya.

Berdasarkan beberapa isu-isu strategis yang dikemukakan tersebut, kebijakan pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2025 dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, ditetapkan beberapa kebijakan dalam rencana pembangunan tahun 2025, seperti: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; 2) Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal; 3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; 4) Pencapaian dan pemenuhan SPM; 5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* terkait seperti: 1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan 4) Reformasi Birokrasi.

Dengan komitmen dari semua pemangku kepentingan pada fokus kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut diharapkan dapat meningkatkan **“Ekonomi Yang Kokoh, Infrastruktur Yang Handal Dan SDM Yang Berkualitas”**. sehingga dapat terwujudnya dan tercapainya beberapa tujuan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Berikut ini uraian tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

Tabel 1.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Provinsi NTT
 Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1.1 Meningkatkan produksi dan produktivitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	1.1.1 Meningkatkan Kapasitas Produksi	1.1.1.1 Peningkatan produksi pertanian melalui; Tanam tanaman pangan dan komoditi pangan lokal, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan), dan Hortikultura. 1.1.1.2 Peningkatan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. 1.1.1.3 Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. 1.1.1.4 Pengembangan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial
	1.2 Meningkatkan peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	1.2.1 Peningkatan Jumlah Kunjungan, lama tinggal dan belanja wisata	1.2.1.1 Pengembangan atraksi wisata 1.2.1.2 Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan 1.2.1.3 Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu,antara dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah
	1.3 Meningkatkan investasi dan neraca perdagangan	1.3.1 Pemantapan infrastruktur perdagangan	1.3.1.1 Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk UMKM
		1.3.2 Perbaikan system usaha dan investasi	1.3.2.1 Percepatan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online
	1.4 Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	1.4.1 Perluasan Akses terhadap lapangan kerja	1.4.1.1 Pemantapan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja. 1.4.1.2 Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja.
		1.4.2 Peningkatan produktivitas angkatan kerja	1.4.2.1 Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. 1.4.2.2 Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program program peningkatan keahlian.
		1.4.3 Perlindungan terhadap pekerja	1.4.3.1 Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
	1.5 Meningkatkan Daya Beli Masyarakat	1.5.1 Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan	1.5.1.1 Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin. 1.5.1.2 Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif. 1.5.1.3 Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemasaran yang berbasis masyarakat. 1.5.1.4 Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.
	1.6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	1.6.1 Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga	1.6.1.1 Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). 1.6.1.2 Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. 1.6.1.3 Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan /kelompok disabilitas. 1.6.1.4 Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga.
	1.7 Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	1.7.1 Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat	1.7.1.1 Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). 1.7.1.2 Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim).
		1.7.2 Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terencil	1.7.2.1 Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) Yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT). 1.7.2.2 Penguatan BUMDES pada wilayah terencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat.
		1.7.3 Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru	1.7.3.1 Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru 1.7.3.2 Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru
	1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1.8.1 Pemantapan Sistem dan Regulasi	1.8.1.1 Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak. 1.8.1.2 Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi. 1.8.1.3 Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak. 1.8.1.4 Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi. 1.8.1.5 Penyesuaian tarif Pajak dan retribusi daerah secara berkala.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.8.2 Pemantapan Sistem Pemungutan	1.8.2.1 Inovasi - inovasi untuk peningkatan Pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompot elektronika, dan <i>E-Payment</i> . 1.8.2.2 Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis Pajak dan retribusi.
		1.8.3 Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset	1.8.3.1 Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan 1.8.3.2 Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi 1.8.3.3 Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah Yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah 1.8.3.4 Optimalisasi sumber-sumber potensi pendapatan secara komprehensif.
	1.9 Terjaminnya kesetaraan gender perlindungan Anak, Disabilitas Inklusi Sosial	1.9.1 Perluasan akses bagi kelompok perempuan dan disabilitas	1.9.1.1 Kesempatan memperoleh pendidikan Yang layak. 1.9.1.2 Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan Yang layak. 1.9.1.3 Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah Yang layak. 1.9.1.4 Kesempatan berusaha Yang layak. 1.9.1.5 Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik.
		1.9.2 Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan dan disabilitas	1.9.2.1 Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum. 1.9.2.2 Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatik. 1.9.2.3 Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan.
		1.9.3 Pemantapan perlindungan terhadap anak	1.9.3.1 Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak. 1.9.3.2 Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatik. 1.9.3.3 Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak.
	1.10 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	1.10.1 Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan	1.10.1.1 Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT. 1.10.1.2 Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan utama.
		1.10.2 Peningkatan akses RT terhadap Pangan	1.10.2.1 Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. 1.10.2.2 Pemantapan stok pangan pada saat krisis.
		1.10.3 Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	1.10.3.1 Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. 1.10.3.2 Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baduta).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.10.4 Dukungan Regulasi	1.10.4.1 Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	2.1.1 Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata	2.1.1.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. 2.1.1.2 Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. 2.1.1.3 Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB. 2.1.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN). 2.1.1.5 Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. 2.1.1.6 Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul 2.1.1.7 Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT.
		2.1.2 Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu	2.1.2.1 Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa.
		2.1.3 Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship	2.1.3.1 Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SDM unggul melalui Pendidikan Vokasi. 2.1.3.2 Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja. 2.1.3.3 Mengoptimalisasi Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan.
		2.1.4 Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru	2.1.4.1 Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB). 2.1.4.2 Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB. 2.1.4.3 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB.
	2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2.2.1 Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan	2.2.1.1 Penyediaan Laboratorium, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. 2.2.1.2 Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional).

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			2.2.1.3 Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan.
		2.2.2 Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan	2.2.2.1 Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan). 2.2.2.2 Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%). 2.2.2.3 Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan. 2.2.2.4 Penyediaan dan distribusi tenaga medis (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan. 2.2.2.5 Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi. 2.2.2.6 Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. 2.2.2.7 Memastikan layanan kesehatan yang komperhensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. 2.2.2.8 Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total.
		2.2.3 Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat	2.2.3.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
		2.2.4 Pencegahan Stunting	2.2.4.1 Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahannya sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. 2.2.4.2 Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil, bayi dan balita yang terintegrasi dengan PAUD HI. 2.2.4.3 Mendorong replikasi PAUD HI sebagai salah satu upaya pencegahan dan eradikasi stunting. 2.2.4.4 Peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. 2.2.4.5 Perbaikan perilaku hidup sehat.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana	3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	3.1.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan	3.1.1.1 Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. 3.1.1.2 Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan.
		3.1.2 Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	3.1.2.1 Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. 3.1.2.2 Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. 3.1.2.3 Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. 3.1.2.4 Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tata kelola air yang baik.
	3.2 Meningkatkan Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah	3.2.1 Pengelolaan Tata Ruang yang berkelanjutan	3.2.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 3.2.1.2 Peningkatan koordinasi tata ruang dengan pemerintah kabupaten/kota. 3.2.1.3 Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis Provinsi.
		3.2.2 Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	3.2.2.1 Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengelolaan sampah organik dan non organik. 3.2.2.2 Peningkatan penggunaan EBT. 3.2.2.3 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Mangrove. 3.2.2.4 Pengelolaan DAS secara terpadu dan holistik antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan.
	3.3 Meningkatkan Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	3.3.1 Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat	3.3.1.1 Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. 3.3.1.2 Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. 3.3.1.3 Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan. 3.3.1.4 Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Adaptasi terhadap Perubahan Iklim seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal. 3.3.1.5 Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. 3.3.1.6 Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB). 3.3.1.7 Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat.
		3.3.2 Penguatan Tatakelola Resiko Bencana	3.3.2.1 Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. 3.3.2.2 Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital.
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	4.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	4.1.1 Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan	4.1.1.1 Penerapan <i>e-government</i> , <i>e-planning</i> , <i>e-budgeting</i> secara terpadu. 4.1.1.2 Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja secara terpadu. 4.1.1.3 Pemantapan sistem pendataan secara terpadu untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. 4.1.1.4 Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali. 4.1.1.5 Pemantapan pelaksanaan <i>maintenance system</i> secara teratur dan berkelanjutan. 4.1.1.6 Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem. 4.1.1.7 Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan.
		4.1.2 Reformasi Regulasi	4.1.2.1 Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web. 4.1.2.2 Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan. 4.1.2.3 Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistis dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja.
		4.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM	4.1.3.1 Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4.1.3.2 Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah.
			4.1.3.3 Pemberian Tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas,
			4.1.3.4 Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i> , seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i> .
			4.1.3.5 Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja.
			4.1.3.6 Rekrutmen ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan ASN pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi.
			4.1.3.7 Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta usaha.
			4.1.3.8 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai.
			4.1.3.9 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

Penentuan prioritas pembangunan Provinsi NTT tahun 2025, sebagaimana pada uraian di atas, tetapi penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat tahun 2025 untuk pemerintah Provinsi NTT menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

1. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitan dengan visi pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya di Kabupaten Malaka serta memperhatikan sinergitas dengan visi pada dokumen perencanaan

pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**. Sesuai dengan harapan dari visi pembangunan Kabupaten Malaka 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan swasembada pangan;
- 2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
- 3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
- 6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

Misi-misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk visi pembangunan daerah. Upaya untuk mencapai misi-misi tersebut, ditetapkan tema pembangunan yaitu **“MEMACU DAYA SAING DAERAH PADA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA BIROKRASI DAN INFRASTRUKTUR WILAYAH”**.Keterkaitan antara misi dengan program prioritas dan arah kebijakan dengan program prioritas sebagaimana pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 1.2
Penjabaran Misi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026

No.	Program Prioritas	Misi
1.	S wasembada Pangan	Misi 1: Mewujudkan swasembada pangan
2.	A dat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama	Misi 2: Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama
3.	K ualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Misi 3: Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;

No.	Program Prioritas	Misi
		Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa
4.	T ata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
5.	I nfrastruktur Publik yang Memadai	Misi 5: Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai Misi 6: Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa

RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2025

Gambar 4.2
Keterkaitan Arah Kebijakan dengan Program Prioritas Tahun 2025



2. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 tersebut, capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3
Target Indikator Makro Kabupaten Malaka Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target	
			2024	2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	62,19-63,00	63,00-65,00
2.	Penduduk di bawah Garis Miskin	Persen	14,42-12,00	12,00-10,00
3.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,-4,0	4,0 - 5,0
4.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	(Juta Rupiah)	3.680.593,59	3.929.449,71
5.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	(Juta Rupiah)	2.198.195,91	2.286.288,53
6.	PDRB Per Kapita ADHB	Ribu Rupiah	17.428,00	18.281,00
7.	PDRB Per Kapita ADHK	Ribu Rupiah	10.409,00	10.637,00
8.	Laju Inflasi	Persen	1,08	0,83
9.	Prevalensi Stunting	Persen	15,50-12,00	12,00-10,00
10.	Kebutuhan Investasi	Rp Juta	24.962.488,20	55.972.002,91
11.	Rasio PAD (IKU)	Persen	1:20,54	1:19,82
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,42	3,37
13.	Indeks Gini	Poin	0,37-0,45	0,37-0,45
14.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,08	90,43
15.	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah	Kategori	C	C
16.	Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	784.037,68	784.037,68

Sumber: RPJMD Malaka 2021-2026.

Sedangkan penyusunan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, akan dibahas pada bab-bab selanjutnya dengan mempertimbangkan penerimaan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA) yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka agar adanya:

1. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Kabupaten Malaka dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka tentang dasar penyusunan RAPBD;
2. Kesamaan rencana tindak lanjut dalam menetapkan program dan prioritas pembangunan daerah serta pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

3. Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya alam daerah. sehingga diharapkan terjadi sinergitas dalam penyusunan program, kegiatan serta penyediaan anggaran dan pelaksanaan;
4. Keterkaitan antara kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD Kab. Malaka TA. 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026
21. Peraturan Bupati Malaka Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penyusunan PPAS

Sistematika dokumen PPAS APBD Tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan sistematika dokumen penyusunan dokumen PPAS APBD.

Bab II : Rencana Penerimaan Daerah

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penerimaan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah maupun Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Bab III : Prioritas Belanja Daerah

Bab ini memuat prioritas belanja daerah untuk tahun anggaran 2025.

Bab IV : Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Bab ini menguraikan tentang plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan/Bidang Urusan, Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun anggaran 2025.

Bab V : Rencana Pembiayaan Daerah

Bab ini memuat tentang rencana pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan daerah untuk periode tahun anggaran 2025.

Bab VI : Penutup

Bab ini memuat penjelasan tentang dokumen PPAS yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Definisi penerimaan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dalam setiap peraturan perundangan-undangan terkait pengelolaan keuangan Negara maupun pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan daerah merupakan salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Sesuai amanat ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menguraikan bahwa:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
2. Penerimaan Daerah terdiri atas: a) Pendapatan Daerah; dan b) penerimaan Pembiayaan daerah.
3. Pengeluaran Daerah terdiri atas: a) Belanja Daerah; dan b) pengeluaran Pembiayaan daerah.
4. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
5. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 6. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan penjelasan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diuraikan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2025, maka rencana penerimaan daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp721.861.863.103,00 dengan penetapan rincian penerimaannya sebagaimana pada uraian berikut ini.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rencana dan target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: a) Pendapatan Pajak Daerah; b) Hasil Retribusi Daerah; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengacu pada Kebijakan Umum APBD ditetapkan sebesar Rp39.205.441.295,00 dari target pendapatan daerah TA. 2024 dan mengalami perubahan dari total proyeksi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp39.140.441.295,00 atau naik sebesar 0.17%

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan b) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/ DBH, Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Alokasi Khusus/DAK), Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa. Khusus pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) belum direncanakan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD maupun dokumen ini, sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Umum APBD yaitu dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS

disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar daerah bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi NTT sesuai kewenangan pemungutan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Proyeksi Pendapatan Transfer tahun anggaran 2025 mengacu pada Kebijakan Umum APBD TA. 2025 ditetapkan sebesar Rp664.679.921.012,00 atau sebesar 92,91% dari target pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 589.848.769.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp 27.625.710.717,00.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang penganggarnya memperhatikan kebijakan seperti pendapatan hibah dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP. Proyeksi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun anggaran 2025 mengacu pada Kebijakan Umum APBD TA. 2025 ditetapkan sebesar Rp 8.000.000.000,00 atau sebesar 1,20% dari target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Berikut ini akan diuraikan proyeksi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah tahun anggaran 2025.

Tabel 2.1
Proyeksi Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.205.441.295,00
4.1.01	Pajak Daerah	10.570.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	17.607.225.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.399.604.035,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.628.612.260,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	617.474.479.717,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	589.848.769.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.625.710.717,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	664.679.921.012,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.181.942.091,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.181.942.091,00
		57.181.942.091,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	721.861.863.103,00

Berdasarkan penyajian data tersebut, terlihat bahwa total penerimaan yang bersumber dari pendapatan daerah sebesar Rp664.679.921.012,00 dari target penerimaan daerah secara keseluruhan belum termasuk penerimaan dari DAK.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Target Penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp57.181.942.091,00 atau sebesar 8,60% dari total target penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan selain itu sebagai alternatif untuk menutupi Defisit

atau selisih kurang antara anggaran Pendapatan dan anggaran Belanja Daerah TA. 2025. Proyeksi Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah Kab. Malaka Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.181.942.091,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.181.942.091,00
		57.181.942.091,00
JUMLAH PENERIMAAN DAERAH		721.861.863.103,00

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penjabaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 telah dilakukan pemutakhiran beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengatur terkait Akun Belanja Daerah yang terbagi atas beberapa kelompok belanja yaitu: (1). Belanja Operasi; (2). Belanja Modal; (3). Belanja Tidak Terduga; (4). Belanja Transfer.

Mengacu pada kebijakan pemerintah terkait belanja daerah yang diuraikan pada dokumen KU APBD Tahun Anggaran 2025, maka prioritas belanja daerah tahun anggaran 2025 yang digambarkan berdasarkan jenis belanja dijabarkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan masing-masing urusan dan bidang urusan, yang sejalan dengan prioritas Kabupaten Malaka 2021-2026 dan tersinkronisasi dengan prioritas Provinsi NTT 2023-2026 dan bersinergi dengan Prioritas nasional 2025-2029.

3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Malaka Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.

Agenda pembangunan nasional terdiri dari 7 (tujuh) prioritas nasional tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pelayanan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Perumusan Agenda Pembangunan nasional tersebut di atas dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Indonesia 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan sinergitas program Pemerintah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2025 dengan prioritas pembangunan nasional.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan sinergitas program Pemerintah Kabupaten Malaka tahun anggaran 2025 dengan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Malaka
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional TA. 2024

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	650,670,640
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata	313,836,500
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	Dinas Pariwisata	213,688,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000
			Padi		
			Jagung		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,617,945,000
			Padi		
			Jagung		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,897,271,250
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,107,360,000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99,999,760
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	345,304,150
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	438,220,000
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi		
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Dinas Perikanan	41,650,000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	733,600,000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	316,190,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	531,311,250
			Jumlah Investor PMA/PMDN		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	287,425,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143,600,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah laporan stabilisasi harga sembako dan bahan penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	71,070,000
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	30,200,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	165,978,033,450
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		
			Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		
			Opini Laporan Keuangan		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	314,200,160
			Rasio PAD		
			Tingkat Efektifitas Pajak Daerah		
			Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah		
	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk dan dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,735,767,010

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,416,618,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,000,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,597,716,500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni budaya terdaftar yang layak tampil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	254,796,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163,223,880
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16,740,000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	600,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	77,130,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	84,999,960
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	Dinas Lingkungan Hidup	422,499,920
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	82,930,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	444,359,428
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152,250,000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD) yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	355,500,000
	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,483,872,587
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249,999,820
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,481,919,000
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP (%)		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Izin Pendidikan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,000,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Jaminan Kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	25,960,042,960
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar (%)		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	18,277,960,000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	8,680,400,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (%)	Dinas Sosial	339,999,635
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial	499,999,700
			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	199,999,825
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	324,999,650
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	560,000,000
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	400,000,000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	40,000,000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	485,975,000
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19,673,000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50,000,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tota Fertility Rete (TFR) (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	319,626,600
			Angka Kelahiran Kasar (Crude Birthrate/ CBR)		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelayanan KB MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	322,485,000
			Unmet Need		
			Akseptor Baru		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148,282,500
			Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase OPD yang memiliki jumlah pegawai minimal 50% dari ABK Persentase pegawai yang berkinerja baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,285,244,750
			Persentase pegawai yang disiplin		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	397,985,000
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	499,975,000
			Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan hasil analisis kebutuhan		
	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114,927,147,049
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kesehatan	32,896,104,791
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	15,550,312,395
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6,442,407,947
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	10,000,000
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	2,445,956,395
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,579,325,368
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Sosial	2,953,452,398
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2,304,245,546
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	2,178,587,704
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302,742,250
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,968,500
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,000,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,918,173,645
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,421,429,476
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perhubungan	2,513,700,368
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	309,012,650
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	337,262,180
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,915,365,319
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2,385,536,452
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,152,849,141
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,327,148,460
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,512,065,261
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,021,000
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perikanan	3,265,903,578
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pariwisata	1,554,550,596
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11,881,629,300
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	50,000,000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	220,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Pemerintahan	724,202,125
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Hukum	742,475,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Hukum	256,525,000
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Perekonomian	424,990,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Perekonomian	416,509,100

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	247,135,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	502,809,515
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	707,530,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	292,469,815
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Umum	2,250,460,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Umum	24,552,830,614

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	777,878,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	570,000,000
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	10,436,228,500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Sekretariat DPRD	17,064,453,833
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,115,380,000
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	148,804,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4,111,950,479
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kualitas Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	168,428,300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9,020,640,865
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,542,497,754
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,500,000,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,346,561,928
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah	1,531,539,000
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern		
			Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
			Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Inspektorat Daerah	4,017,781,187
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	30,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Tengah	1,546,790,234
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Timur	53,770,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Timur	119,450,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Timur	1,432,588,601
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Kobalima	12,000,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	75,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima	1,456,322,375
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima Timur	94,019,750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima Timur	1,370,996,364
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Io Kufeu	43,950,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	34,080,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Io Kufeu	1,265,401,986
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Botin Leobe	19,995,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobe	30,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobe	30,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Botin Leobe	1,284,296,584
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Laenmanen	10,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	50,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Laenmanen	1,551,207,126
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Sasitamean	50,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Sasitamean	1,327,300,091
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Barat	9,860,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Barat	74,990,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Barat	2,085,289,244
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Weliman	59,990,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Weliman	24,990,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Weliman	74,990,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Weliman	1,907,030,304
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Rinhat	25,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	10,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	58,500,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Rinhat	2,012,253,222
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Wewiku	44,540,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	24,820,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	64,720,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Wewiku	1,307,273,546
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,658,014,026
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	280,390,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	489,650,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Angka)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,703,410,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11,974,672,000
			Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,124,000
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan SKPD tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000
			Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100,000,000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani		
			Persentase KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,550,000,000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Waktu tanggap (response time) penanganan bencana		
			Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	309,999,690

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	17,300,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	329,670,000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000
	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170,579,075
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Wewiku	98,770,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Wewiku	50,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Rinhat	90,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Rinhat	17,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Weliman	24,990,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Weliman	122,630,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Barat	68,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Barat	10,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Sasitamean	149,773,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Sasitamean	70,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Laenmanen	30,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Laenmanen	10,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Botin Leobebe	80,070,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Botin Leobebe	53,720,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Io Kufeu	68,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Io Kufeu	22,900,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitas		

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima Timur	66,400,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima Timur	34,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima	63,990,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima	12,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Timur	84,500,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Timur	10,200,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Tengah	136,280,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Tengah	35,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	28,650,000
	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1,115,610,000

No.	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	26,890,000
			Persentase ketepatan waktu pelayanan		

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT.

Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu: 1) Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial; 2) Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; 4) Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Isu-isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan dengan mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada dengan harapan segala pembangunan yang dilaksanakan dapat mendukung keharmonisan dan keberlangsungan lingkungan dan ekologi.
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan. Upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan sehingga pengembangan daya saing daerah pada pertumbuhan pendapatan per kapita yang bersumber dari sektor-sektor ini dari tahun ke tahun terus meningkat.
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan Masalah Sosial lainnya. kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.
4. Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Bencana dan perubahan iklim seperti penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa dan hilangnya serapan karbondioksida, memiliki tantangan terhadap pembangunan dalam aspek lingkungan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan serta terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Upaya yang dapat dilakukan yaitu

mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam sistem perencanaan pembangunan sosial. Oleh karena itu Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT. Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
6. Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
7. Dampak Covid-19. Dampak domino dari Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur, oleh karena itu perlu ditetapkan langkah-langkah yang komprehensif dalam penanganannya.

Berdasarkan beberapa isu-isu strategis yang dikemukakan tersebut, maka ditetapkan isu strategis pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 yaitu:

1. Kemiskinan;
2. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM serta kemerosotan nilai-nilai budaya;
3. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan hilirisasi);
4. Belum optimalnya pengembangan pariwisata;
5. Belum optimalnya pembangunan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau;
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

kebijakan pembangunan daerah Provinsi NTT tahun 2025 dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi, ditetapkan beberapa kebijakan dalam rencana pembangunan tahun 2025, seperti: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan; 2) Pengembangan dan penguatan potensi- potensi ekonomi lokal; 3) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar; 4) Pencapaian dan pemenuhan SPM; 5) Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku

kepentingan lainnya. Kebijakan pembangunan tersebut dijabarkan dalam program prioritas pembangunan tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh seluruh *stakeholders* terkait seperti: 1) Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; 2) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana; dan 4) Reformasi Birokrasi.

Dengan komitmen dari semua pemangku kepentingan pada fokus kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut diharapkan dapat meningkatkan **“EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS”** sehingga dapat terwujudnya tercapainya beberapa tujuan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai terwujudnya tujuan pembangunan Provinsi NTT tahun 2025 tersebut, ditetapkan beberapa arah kebijakan pembangunan tahun 2025 meliputi:

1. Pengembangan Rantai Nilai Ekonomi Lokal;
2. Penguatan Sistem Ekonomi Masyarakat;
3. Sinergitas tujuan pembangunan dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur; dan
6. Pencapaian dan pemenuhan SPM.

Gambaran Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malaka Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi NTT

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
	Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	650,670,640
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata	313,836,500
			Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	Dinas Pariwisata	213,688,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000
			Padi		
			Jagung		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000
			Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000
			Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi		
			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,617,945,000
			Padi		
			Jagung		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,897,271,250
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,107,360,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99,999,760
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	345,304,150
			Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	438,220,000
			Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi		
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Dinas Perikanan	41,650,000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	733,600,000
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	316,190,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	531,311,250
			Jumlah Investor PMA/PMDN		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	287,425,000
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143,600,000
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah laporan stabilisasi harga sembako dan bahan penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	71,070,000
			Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTIP) bertanda tera sah yang berlaku		
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	30,200,000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	165,978,033,450
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		
			Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan		
			Opini Laporan Keuangan		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	314,200,160
			Rasio PAD		
			Tingkat Efektifitas Pajak Daerah		
			Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah		
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1,115,610,000
			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	26,890,000
			Persentase ketepatan waktu pelayanan		
	Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,483,872,587
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)		
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249,999,820
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,481,919,000
			Rasio Guru/ Murid jenjang SMP (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Izin Pendidikan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,000,000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Jaminan Kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	25,960,042,960
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar (%)		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	18,277,960,000
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	8,680,400,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (%)	Dinas Sosial	339,999,635
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)		
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial	499,999,700
			Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
			Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
			Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	199,999,825
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	324,999,650
		PROGRAM PELATHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	560,000,000
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	400,000,000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	40,000,000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	485,975,000
			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender		
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19,673,000
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20,000,000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tota Fertility Rete (TFR) (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	319,626,600
			Angka Kelahiran Kasar (Crude Birthrate/ CBR)		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelayanan KB MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	322,485,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Unmet Need		
			Akseptor Baru		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148,282,500
			Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase OPD yang memiliki jumlah pegawai minimal 50% dari ABK Persentase pegawai yang berkinerja baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,285,244,750
			Persentase pegawai yang disiplin		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	397,985,000
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	499,975,000
			Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan hasil analisis kebutuhan		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk dan dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,735,767,010
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,416,618,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,000,000,000
	Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114,927,147,049

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kesehatan	32,896,104,791
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	15,550,312,395
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6,442,407,947
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	10,000,000
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	2,445,956,395
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,579,325,368
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Sosial	2,953,452,398
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2,304,245,546
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	2,178,587,704
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302,742,250
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210,000,000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,968,500
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,918,173,645
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,421,429,476
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perhubungan	2,513,700,368
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	309,012,650
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik		
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	337,262,180
			Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,915,365,319
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2,385,536,452

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,152,849,141
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,327,148,460
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,512,065,261
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,021,000
			Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perikanan	3,265,903,578
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pariwisata	1,554,550,596
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11,881,629,300
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	50,000,000
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	220,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Pemerintahan	724,202,125
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Hukum	742,475,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Hukum	256,525,000
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Perekonomian	424,990,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Perekonomian	416,509,100
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	247,135,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	502,809,515
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	707,530,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	292,469,815
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Umum	2,250,460,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Umum	24,552,830,614

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	777,878,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	570,000,000
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	10,436,228,500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Sekretariat DPRD	17,064,453,833
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,115,380,000
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan		
			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	148,804,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4,111,950,479
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kualitas Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	168,428,300
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9,020,640,865
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,542,497,754
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,500,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,346,561,928
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah	1,531,539,000
			Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern		
			Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
			Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Inspektorat Daerah	4,017,781,187
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	30,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Tengah	1,546,790,234

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Timur	53,770,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Timur	119,450,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Timur	1,432,588,601
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Kobalima	12,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	75,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima	1,456,322,375

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima Timur	94,019,750
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima Timur	1,370,996,364
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Io Kufeu	43,950,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	34,080,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Io Kufeu	1,265,401,986
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Botin Leobe	19,995,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobe	30,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobe	30,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Botin Leobe	1,284,296,584
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Laenmanen	10,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	25,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	50,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Laenmanen	1,551,207,126
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Sasitamean	50,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Sasitamean	1,327,300,091
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Barat	9,860,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Barat	74,990,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Barat	2,085,289,244
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Weliman	59,990,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Weliman	24,990,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Weliman	74,990,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Weliman	1,907,030,304
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Rinhat	25,000,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	10,000,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	58,500,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Rinhat	2,012,253,222
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Wewiku	44,540,000
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan		
			Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu		
			Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	24,820,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	64,720,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Wewiku	1,307,273,546
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,658,014,026
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)		
			Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	444,359,428
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69,000,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152,250,000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD) yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	355,500,000
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170,579,075
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Wewiku	98,770,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Wewiku	50,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Rinhat	90,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Rinhat	17,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Weliman	24,990,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Weliman	122,630,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Barat	68,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Barat	10,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Sasitamean	149,773,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Sasitamean	70,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Laenmanen	30,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Laenmanen	10,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Botin Leobebe	80,070,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Botin Leobebe	53,720,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Io Kufeu	68,000,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Io Kufeu	22,900,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima Timur	66,400,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima Timur	34,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima	63,990,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima	12,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Timur	84,500,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Timur	10,200,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Tengah	136,280,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Tengah	35,000,000
			Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi		
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	28,650,000
	Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	280,390,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	489,650,000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Angka)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,703,410,000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11,974,672,000
			Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (%)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,124,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan SKPD tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000
			Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100,000,000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000
			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani		
			Persentase KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,550,000,000
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
			Waktu tanggap (response time) penanganan bencana		
			Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana		
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	309,999,690
			Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan		
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	17,300,000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	329,670,000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000

No.	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,597,716,500
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni budaya terdaftar yang layak tampil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	254,796,000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163,223,880
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16,740,000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	600,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	77,130,000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	84,999,960
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	Dinas Lingkungan Hidup	422,499,920
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	82,930,000

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malaka

Prioritas pembangunan Tahun 2025 terdiri atas prioritas dan sasaran yang dijalankan melalui Program Pembangunan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selanjutnya Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka pada Tahun Anggaran 2025.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RKPD pada Tahun 2024. Musrenbang RKPD pada Tahun 2024 adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2025, dimana Pemangku kepentingan merupakan segenap pihak yang terkait dengan pembangunan, yaitu pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Malaka. Perencanaan tahun 2024 diharapkan terjadi perubahan paradigma, melalui pengendalian anggaran daerah dan lebih fokus pada prioritas daerah dengan prinsip **Money Follow Program Priority**, agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka periode 2021-2026.

Perubahan paradigma dari ***“money follow function”*** bergeser menjadi ***“money follow program Priority”***, dimana tidak perlu semua tugas pokok dan fungsi (Tusi) harus dibiayai secara merata. Kalau perlu memangkas kegiatan yang nomenklaturnya yang tidak jelas dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan program dan kegiatan harus terukur. Paradigma itu menekankan penyusunan anggaran berbasis skala prioritas dan program yang bersifat mendesak untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pengalihan paradigma ***“Money follow function”*** ke ***“money follow program Priority”*** bertujuan pencapaian pembangunan prioritas yang **langsung mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat**. Dengan demikian, alokasi anggaran tidak lagi menggunakan struktur organisasi sebagai basis pengalokasian anggaran, akan tetapi berdasarkan pada program prioritas pembangunan dan program pendukung lainnya yang berkontribusi terhadap pencapaian program prioritas tersebut.

Program prioritas adalah program yang akan menggerakkan pembangunan secara simultan dan saling bersinergi, disertai dengan langkah-langkah perbaikan, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Malaka 2021-2026. Prioritas atau fokus pembangunan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Swasembada Pangan dengan sasaran Meningkatnya Ekonomi Daerah yang berkelanjutan, Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
2. Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Agama dengan sasaran meningkatnya pengembangan dan pelestarian adat istiadat, seni dan budaya, meningkatnya peran pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing dan meningkatnya kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan sasaran Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel;
5. Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai dengan sasaran Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan;

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Prioritas tersebut di atas juga disediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah seperti Penyediaan Anggaran Operasional bagi Perangkat Daerah baik pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah, Unsur Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan Umum sehingga dapat menunjang Pencapaian Program Prioritas Kabupaten Malaka Tahun 2025.

Prioritas program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja tahun anggaran 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
	Mewujudkan Swasembada Pangan		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	Dinas Pariwisata	650,670,640	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Dinas Pariwisata	313,836,500	
				Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	Dinas Pariwisata	213,688,000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000	
				Padi			
				Jagung			
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000	
				Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi			
				Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36,260,000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	613,680,000	
				Jumlah pembudidaya ternak yang berproduksi			
				Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan			

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi pertanian per tahun:	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4,617,945,000	
--	--	--	--	-------------------------------	---	---------------	--

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Padi			
				Jagung			
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,897,271,250	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1,107,360,000	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99,999,760	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan	345,304,150	
				Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan	438,220,000	
				Jumlah pembudidaya perikanan yang berproduksi			
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Dinas Perikanan	41,650,000	
	Pengembangan Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Hidup Agama		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk dan dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,735,767,010	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan prestasi olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,416,618,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	20,000,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,000,000,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Kebudayaan Daerah yang dikembangkan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1,597,716,500	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni budaya terdaftar yang layak tampil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	254,796,000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163,223,880	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	444,359,428	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	69,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152,250,000	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (IPOLEKSOSBUD) yang ditindaklanjuti	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	355,500,000	
	Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13,483,872,587	
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)			
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)			
		Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD, Dikdas dan Kesetaraan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	249,999,820	
		Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru/ Murid jenjang SD (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17,481,919,000	
				Rasio Guru/ Murid jenjang SMP (%)			
		Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Izin Pendidikan (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25,000,000	
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Jaminan Kesehatan (%)	Dinas Kesehatan	25,960,042,960	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu sesuai standar (%)			
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	18,277,960,000	
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	8,680,400,000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan (%)	Dinas Sosial	339,999,635	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)			
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Dinas Sosial	499,999,700	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
				Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	199,999,825	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Dinas Sosial	324,999,650	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	560,000,000	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	400,000,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	40,000,000	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	485,975,000	
				Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender			
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19,673,000	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50,000,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20,000,000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42,000,000	
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tota Fertility Rete (TFR) (Angka Kelahiran Total)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	319,626,600	
				Angka Kelahiran Kasar (Crude Birthrate/ CBR)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelayanan KB MKJP	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	322,485,000	
				Unmet Need			
				Akseptor Baru			
		Meningkatnya derajat kese	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	148,282,500	
				Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)			
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase OPD yang memiliki jumlah pegawai minimal 50% dari ABK Persentase pegawai yang berkinerja baik	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2,285,244,750	
				Persentase pegawai yang disiplin			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	397,985,000	
				Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
				Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Inovatif dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114,927,147,049	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kesehatan	32,896,104,791	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	15,550,312,395	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6,442,407,947	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja	733,600,000	
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Satuan Polisi Pamong Praja	10,000,000	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Satuan Polisi Pamong Praja	2,445,956,395	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,579,325,368	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Sosial	2,953,452,398	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2,304,245,546	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Lingkungan Hidup	2,178,587,704	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	302,742,250	
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210,000,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,968,500	
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,918,173,645	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	170,579,075	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,421,429,476	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,450,817,707	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perhubungan	2,513,700,368	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	309,012,650	
				Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik			
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan layanan SPBE yang ditangani	Dinas Komunikasi dan Informatika	337,262,180	
				Persentase kepuasan pelayanan informasi bagi publik			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,915,365,319	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RA)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	115,610,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2,385,536,452	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	531,311,250	
				Jumlah Investor PMA/PMDN			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	287,425,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143,600,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,152,849,141	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	2,327,148,460	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	499,975,000	
				Persentase pemenuhan koleksi buku sesuai dengan hasil analisis kebutuhan			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,512,065,261	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50,021,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Perikanan	3,265,903,578	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Pariwisata	1,554,550,596	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2,451,265,559	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11,881,629,300	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	26,890,000	
				Persentase ketepatan waktu pelayanan			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah laporan stabilisasi harga sembako dan bahan penting	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	71,070,000	
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase jumlah pelayanan tera yang tepat waktu	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	30,200,000	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	1,115,610,000	
				Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	28,650,000	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	50,000,000	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pemerintahan	220,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Bagian Pemerintahan	724,202,125	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Hukum	742,475,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Hukum	256,525,000	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Perekonomian	424,990,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Perekonomian	416,509,100	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	247,135,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Bagian Administrasi Pembangunan	502,809,515	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	707,530,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	292,469,815	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan (%)	Bagian Umum	2,250,460,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Bagian Umum	24,552,830,614	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	777,878,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	570,000,000	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	Sekretariat DPRD	10,436,228,500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Sekretariat DPRD	17,064,453,833	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,115,380,000	
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan			
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	148,804,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	4,111,950,479	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	165,978,033,450	
				Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			
				Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan			
				Opini Laporan Keuangan			
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran			
				Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan			
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kualitas Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	168,428,300	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	314,200,160	
				Rasio PAD			
				Tingkat Efektifitas Pajak Daerah			
				Tingkat Efektifitas Retribusi Daerah			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9,020,640,865	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,542,497,754	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1,500,000,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Pengelolaan Wilayah Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	316,190,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2,346,561,928	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Inspektorat Daerah	1,531,539,000	
				Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern			
				Persentase rekomendasi pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah			
				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah			
				Persentase rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Inspektorat Daerah	4,017,781,187	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Tengah	35,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	20,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Tengah	30,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Tengah	136,280,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Tengah	1,546,790,234	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Timur	53,770,000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Timur	10,200,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Timur	119,450,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Timur	84,500,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Timur	1,432,588,601	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Kobalima	12,000,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima	12,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	25,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima	75,000,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima	63,990,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima	1,456,322,375	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Kobalima Timur	34,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Kobalima Timur	94,019,750	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Kobalima Timur	66,400,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Kobalima Timur	1,370,996,364	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Io Kufeu	43,950,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Io Kufeu	22,900,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	25,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Io Kufeu	34,080,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Io Kufeu	68,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Io Kufeu	1,265,401,986	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Botin Leobebe	19,995,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Botin Leobebe	53,720,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobebe	30,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Botin Leobebe	30,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Botin Leobebe	80,070,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Botin Leobebe	1,284,296,584	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Laenmanen	10,000,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Presentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Presentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Laenmanen	10,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	25,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Laenmanen	50,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Laenmanen	30,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Kecamatan Laenmanen	1,551,207,126	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Sasitamean	70,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Sasitamean	50,000,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Sasitamean	149,773,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Sasitamean	1,327,300,091	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Malaka Barat	9,860,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Malaka Barat	10,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Malaka Barat	74,990,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Malaka Barat	68,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Malaka Barat	2,085,289,244	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Weliman	59,990,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Weliman	122,630,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Weliman	24,990,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Weliman	74,990,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Weliman	24,990,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Kecamatan Weliman	1,907,030,304	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Rinhat	25,000,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Rinhat	17,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	10,000,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Rinhat	58,500,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Rinhat	90,000,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah daerah (%)	Kecamatan Rinhat	2,012,253,222	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Kecamatan Wewiku	44,540,000	
				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan			
				Persentase jenis pelayanan yang dapat disampaikan tepat waktu			
				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menindaklanjuti konsep inovasi	Kecamatan Wewiku	50,000,000	
				Persentase Potensi Usaha Desa yang difasilitasi			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda dan Perkada di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	24,820,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	Kecamatan Wewiku	64,720,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina	Kecamatan Wewiku	98,770,000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Kecamatan Wewiku	1,307,273,546	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,658,014,026	
				Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (%)			
				Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (%)			
	Pengembangan Infrastruktur Publik yang Memadai		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	280,390,000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16,740,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	489,650,000	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Angka)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4,703,410,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	11,974,672,000	
				Persentase tingkat kondisi jalan desa strategis dalam kondisi mantap (%)			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,124,000	

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasan SKPD tanpa kecelakaan konstruksi (Rasio)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (Rasio)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000	
				Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun (%)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100,000,000	
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72,120,000	
				Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani			
				Persentase KK masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menempati hunian yang layak			
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,550,000,000	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
				Waktu tanggap (response time) penanganan bencana			
				Meningkatkan rekonstruksi dan rehabilitasi sarana prasarana yang terdampak bencana			

No.	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket.
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	600,000,000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	77,130,000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dinas Lingkungan Hidup	84,999,960	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	Dinas Lingkungan Hidup	422,499,920	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengangkutan sampah yang menumpuk di TPS / permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	82,930,000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan	309,999,690	
				Persentase jalan dengan rambu lalu lintas dan peringatan rawan kecelakaan			
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	17,300,000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	329,670,000	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan TA. 2025

Plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah, Unsur Kewilayahan dan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Malaka. **Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai:** Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer sebesar **Rp720.861.863.103** Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	146.167.938.456,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	146.167.938.456,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	13.483.872.587,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	7.106.422.182,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	120.000.000,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	243.149.500,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	122.713.632,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.350.366.125,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.468.515.100,00	
1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	506.899.500,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	993.032.500,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	301.745.825,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.439.405.455,00	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	120.000.000,00	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	285.976.900,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	124.677.300,00	
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.352.151.290,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	92.365.825,00	

1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.234.327.500,00	
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	229.906.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.638.044.950,00	
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	224.895.250,00	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	206.274.100,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	213.859.100,00	
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300.000.000,00	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.000.000,00	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	293.020.000,00	
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	800.000.000,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	299.996.500,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	300.000.000,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	50.000.000,00	
1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	250.000.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	249.999.820,00	
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	249.999.820,00	
1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	249.999.820,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17.481.919.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.481.919.000,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	359.238.500,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	17.122.680.500,00	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	25.000.000,00	
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	

1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	114.927.147.049,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	200.000.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	113.835.901.099,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.427.147.099,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.754.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.305.950,00	
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.608.450,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.490.500,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	368.207.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.070.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.070.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.870.000,00	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.870.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	101.364.820.146,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	58.856.147.751,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	25.960.042.960,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.920.000,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	16.920.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.849.422.960,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	64.210.680,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.000.000.000,00	

1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	17.785.212.280,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	93.700.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	93.700.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.896.104.791,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.684.124.551,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.426.204.551,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	257.920.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.422.240,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.885.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.551.740,00	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.500.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.586.500,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.899.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.610.000,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	101.610.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	749.948.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	749.948.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun	42.508.672.395,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.277.960.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.777.960.000,00	

1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	277.960.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.500.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.500.000.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	16.500.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	8.680.400.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	8.680.400.000,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	8.680.400.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.550.312.395,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.550.312.395,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.421.832.395,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.000.000,00	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.480.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.151.513.947,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	24.051.513.947,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	280.390.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	280.390.000,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	280.390.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.740.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.740.000,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	16.740.000,00	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	489.650.000,00	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	489.650.000,00	

1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	489.650.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	4.703.410.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.703.410.000,00	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4.703.410.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11.974.672.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	11.974.672.000,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	11.974.672.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	72.124.000,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	72.124.000,00	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	72.124.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	72.120.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	72.120.000,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	72.120.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.442.407.947,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.677.241.947,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.351.761.947,00	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	325.480.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.559.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.250.000,00	
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.353.000,00	

1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.956.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	762.740.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	762.740.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.560.000,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.560.000,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	388.307.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	385.552.000,00	
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.755.000,00	
5.01.5.05.1.03.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	100.000.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100.000.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	100.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	72.120.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	72.120.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	72.120.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	72.120.000,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	72.120.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	6.308.881.763,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	3.179.556.395,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	733.600.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	593.600.000,00	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	25.000.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	60.000.000,00	

1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	59.100.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	449.500.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80.000.000,00	
1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	30.000.000,00	
1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50.000.000,00	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	60.000.000,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	60.000.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	10.000.000,00	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	10.000.000,00	
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	10.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.445.956.395,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.747.956.395,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.956.395,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65.000.000,00	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.850.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.850.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	

1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.140.000,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000,00	
1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.140.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.880.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.880.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.130.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.130.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
1.05.1.06.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.129.325.368,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.550.000.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.000.000.000,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	250.000.000,00	
1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	275.000.000,00	
1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	175.000.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	275.000.000,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	275.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.579.325.368,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.017.515.368,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	957.515.368,00	

1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	
1.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.840.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.340.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000,00	
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.000.000,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.970.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.970.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.318.451.208,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	4.318.451.208,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	339.999.635,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	339.999.635,00	

1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.999.780,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	249.999.855,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	499.999.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	499.999.700,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	349.999.800,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	149.999.900,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	199.999.825,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	199.999.825,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	199.999.825,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	324.999.650,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	324.999.650,00	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	49.999.825,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	274.999.825,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.953.452.398,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.967.349.193,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.349.193,00	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.118.975,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.990.575,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.992.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.900,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.919.925,00	

1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.999.825,00	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.981.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.750.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	399.488.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.689.605,00	
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.689.780,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.999.825,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.924.625,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.735.000,00	
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.190.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.999.625,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.370.000,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.370.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.304.245.546,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	3.304.245.546,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	560.000.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	560.000.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	560.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	400.000.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	300.000.000,00	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	

2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	10.000.000,00	
-------------------	--	---------------	--

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	90.000.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	40.000.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	10.000.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.304.245.546,00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.648.365.546,00	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.559.165.546,00	
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.200.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	456.920.000,00	
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.500.000,00	
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.150.000,00	
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.500.000,00	
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.770.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.710.000,00	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000,00	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.710.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.250.000,00	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.140.000,00	

2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.110.000,00	
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.599.004.207,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.599.004.207,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	485.975.000,00	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	485.975.000,00	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	485.975.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	19.673.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.673.000,00	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.673.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	50.000.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.000.000,00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	42.000.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	42.000.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.450.817.707,00	
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.926.363.527,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.866.363.527,00	
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.000.000,00	

2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.860.680,00	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.997.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.996.000,00	
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.999.680,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	99.999.760,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	99.999.760,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	99.999.760,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	99.999.760,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	99.999.760,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	3.438.647.584,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	3.438.647.584,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	600.000.000,00	
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	600.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	77.130.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	77.130.000,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	26.480.000,00	
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.650.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	84.999.960,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	84.999.960,00	

2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	84.999.960,00	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	422.499.920,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	422.499.920,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	172.499.920,00	
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	250.000.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	82.930.000,00	
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	82.930.000,00	
2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	82.930.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.178.587.704,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.271.149.784,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.196.149.784,00	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.000.000,00	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	70.000.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.998.350,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.998.550,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.800,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.000.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	354.349.570,00	
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.999.770,00	

2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	49.350.000,00	
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000,00	
2.11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.999.800,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.020.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.520.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.070.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.740.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.330.000,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.441.298.145,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.441.298.145,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	302.742.250,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	302.742.250,00	
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	302.742.250,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	210.000.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	210.000.000,00	
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	210.000.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	140.968.500,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140.968.500,00	
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	140.968.500,00	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	140.000.000,00	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	140.000.000,00	

2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	140.000.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.918.173.645,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.274.782.145,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.004.195.895,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.231.500,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.270.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.961.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.000.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.250.000,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.250.000,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.910.000,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.820.000,00	
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.090.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.327.775.561,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.327.775.561,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	170.579.075,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	170.579.075,00	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	59.309.000,00	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	91.000.075,00	

2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20.270.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.735.767.010,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.735.767.010,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.600.000.000,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100.000.010,00	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	35.767.000,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.421.429.476,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.064.960,00	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.065.000,00	
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.990,00	
2.13.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.990,00	
2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.990,00	
2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.499.990,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.862.937.656,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.794.777.656,00	
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.160.000,00	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.546.860,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.992.860,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000,00	

2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.554.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.260.000,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.260.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.440.000,00	
2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.440.000,00	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.000.000,00	
2.13.01.2.13	Penataan Organisasi	94.180.000,00	
2.13.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	94.180.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.259.855.600,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.259.855.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	319.626.600,00	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	219.801.600,00	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	189.801.600,00	
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	25.000.000,00	
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	5.000.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	99.825.000,00	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	99.825.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	322.485.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5.000.000,00	
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	5.000.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.800.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	53.500.000,00	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	39.100.000,00	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90.000.000,00	
2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10.600.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	67.485.000,00	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	19.800.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	47.685.000,00	

2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	148.282.500,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	148.282.500,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	48.600.000,00	
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	49.682.500,00	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	50.000.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.450.817.707,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.860.680,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.900.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.968.000,00	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.950.000,00	
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.950.000,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.973.500,00	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.262.000,00	
2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.711.500,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.670.000,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	197.670.000,00	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.823.700.058,00	

2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.823.700.058,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	309.999.690,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	9.999.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	9.999.640,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	99.999.925,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.925,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.125,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	200.000.125,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.513.700.368,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.660.400.178,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.573.700.178,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86.700.000,00	
2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	253.320.530,00	
2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	49.999.780,00	
2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	203.320.750,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.149.660,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.994.180,00	
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.945.000,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.422.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.999.840,00	

2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.788.750,00	
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.999.890,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.990.000,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.990.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.840.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.840.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.561.640.149,00	
2.16.2.21.0.00.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.561.640.149,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	309.012.650,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	309.012.650,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	67.961.150,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	142.535.500,00	
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	33.700.000,00	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	64.816.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	337.262.180,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	120.841.000,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	120.841.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	216.421.180,00	
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	101.997.355,00	

2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	114.423.825,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.915.365.319,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.343.270.309,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.199.140.309,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.930.000,00	
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.320.000,00	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.320.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.625.010,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.439.010,00	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.186.000,00	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.770.000,00	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.770.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.140.000,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.140.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.240.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.240.000,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	

2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.616.756.452,00	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2.616.756.452,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	115.610.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	115.610.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	115.610.000,00	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	115.610.000,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	115.610.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	115.610.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.385.536.452,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.652.745.952,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.170.952,00	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	260.575.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.268.900,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.587.000,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.187.650,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.364.250,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.130.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.500.000,00	
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	202.500.000,00	

2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.030.000,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.030.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.991.600,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.540.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.270.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.181.600,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.115.185.391,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.115.185.391,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	531.311.250,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	531.311.250,00	
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	265.313.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	265.998.250,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	287.425.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	287.425.000,00	
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	262.025.000,00	
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	25.400.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	143.600.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	143.600.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	143.600.000,00	

2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.152.849.141,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.500.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.709.395.631,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.615.185.631,00	
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	89.710.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.301.600,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.015.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.533.600,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.660.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.093.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.926.510,00	

2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.926.510,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.785.400,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.580.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.205.400,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.940.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.940.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.783.766.460,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.783.766.460,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	20.000.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	20.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.416.618.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.416.618.000,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.666.618.000,00	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	750.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	20.000.000,00	

2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	20.000.000,00	
2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	20.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.327.148.460,00	
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.117.098.460,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.067.148.460,00	
2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.950.000,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.968.000,00	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.950.000,00	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.018.000,00	
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	386.500.000,00	
2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	386.500.000,00	
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.942.000,00	
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.942.000,00	
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.640.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.140.000,00	
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	650.000.000,00	
2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.500.000,00	
8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.000.000.000,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.000.000.000,00	

2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	1.000.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.015.736.380,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.015.736.380,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.597.716.500,00	
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	947.716.500,00	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	797.716.500,00	
2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	150.000.000,00	
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	300.000.000,00	
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	150.000.000,00	
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	200.000.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	254.796.000,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	254.796.000,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	150.000.000,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	104.796.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	163.223.880,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	163.223.880,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	163.223.880,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.012.040.261,00	

2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.012.040.261,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	499.975.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.975.000,00	
2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	200.000.000,00	
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.975.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	150.000.000,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	50.000.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.512.065.261,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	874.163.036,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	812.063.036,00	
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	62.100.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.210.625,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.500,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.315.125,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.001.000,00	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.912.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	254.923.600,00	

2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	108.423.600,00	
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.500.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.425.000,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.570.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.855.000,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.343.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.340.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.003.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	50.021.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50.021.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	50.021.000,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	35.066.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	14.955.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.091.077.728,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	4.091.077.728,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	345.304.150,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	345.304.150,00	
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.400.000,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	294.904.150,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	438.220.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			

1	2	3	4
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	438.220.000,00	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.090.000,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	207.240.000,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.890.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	41.650.000,00	
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	41.650.000,00	
3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	21.760.000,00	
3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	19.890.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.265.903.578,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.519.388.317,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.412.130.317,00	
3.25.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	107.258.000,00	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000,00	
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	
3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	246.464.500,00	
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.641.750,00	
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.960.000,00	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.862.750,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	169.503.439,00	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.503.439,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.000.000,00	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.547.322,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.757.500,00	
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.080.000,00	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.709.822,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.732.745.736,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	2.732.745.736,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	650.670.640,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	329.170.640,00	
3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	299.170.640,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	321.500.000,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	321.500.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	313.836.500,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	313.836.500,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	313.836.500,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	213.688.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	213.688.000,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	213.688.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.550.596,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.226.786.596,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.175.786.596,00	

3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.000.000,00	
-------------------	---	---------------	--

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	112.201.000,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.760.000,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.345.000,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.096.000,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.520.000,00	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	126.520.000,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.003.000,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.003.000,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.040.000,00	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.040.000,00	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.641.671.109,00	
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.137.465.559,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	36.260.000,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.260.000,00	
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	36.260.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	613.680.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	569.940.000,00	

3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	569.940.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.451.265.559,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.947.875,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.853.700,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.476.175,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.436.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	36.260.000,00	
3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	36.260.000,00	
3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	36.260.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	613.680.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	43.740.000,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	43.740.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.451.265.559,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.538.475.684,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.473.435.684,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.040.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.947.875,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.182.000,00	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	571.940.000,00	
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	517.940.000,00	

3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	15.500.000,00	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.500.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.022.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.022.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.880.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19.504.205.550,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.617.945.000,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.617.945.000,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.617.945.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.897.271.250,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.897.271.250,00	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	1.897.271.250,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.107.360.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.107.360.000,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	357.360.000,00	
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	750.000.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.881.629.300,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.500.000,00	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.500.000,00	

3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.841.185.550,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.737.025.550,00	
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.160.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.433.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.285.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.732.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.416.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.340.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.340.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.524.170.750,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	515.650.000,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.007.500.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.020.750,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	128.160.000,00	
2.17.3.30.3.31.01.0000	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	128.160.000,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	26.890.000,00	
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	26.890.000,00	
3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	26.890.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	71.070.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.870.000,00	

3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	50.870.000,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.200.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.200.000,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	30.200.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	30.200.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	15.100.000,00	
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	15.100.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.115.610.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.115.610.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.115.610.000,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	115.610.000,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.000.000.000,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	375.620.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	375.620.000,00	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	28.650.000,00	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	28.650.000,00	
3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	28.650.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	17.300.000,00	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.300.000,00	
3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	17.300.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	329.670.000,00	

3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	329.670.000,00	
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	329.670.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	34.499.411.119,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Pemerintahan	994.202.125,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.000.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50.000.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	220.000.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	220.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	220.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	724.202.125,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.420.000,00	
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.420.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.920.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.979.125,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.999.125,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.980.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75.285.000,00	

4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.285.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.700.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.200.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.995.500,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000,00	
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.495.500,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	304.902.500,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	66.330.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	238.572.500,00	
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	999.000.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	742.475.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	742.475.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150.041.500,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	592.433.500,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	256.525.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	98.880.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98.880.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	101.317.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.254.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.043.000,00	

4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.020.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.900.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.400.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.428.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.290.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.138.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Perekonomian	841.499.100,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	424.990.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	424.990.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	375.000.000,00	
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	49.990.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	416.509.100,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.880.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.000.000,00	
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72.000.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174.990.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.990.000,00	

4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.050.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.550.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.589.100,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.090.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.499.100,00	
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Administrasi Pembangunan	749.944.515,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	247.135.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	247.135.000,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	247.135.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	502.809.515,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.000.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.929.250,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.147.500,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.651.750,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	301.130.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.532.765,00	

4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.532.765,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.200.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.147.500,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.690.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	957.500,00	
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Kesejahteraan Rakyat	999.999.815,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	707.530.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	707.530.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	319.500.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	388.030.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	292.469.815,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.920.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.847.315,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.445.345,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.521.970,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.880.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.170.000,00	

4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.170.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.532.500,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.290.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	742.500,00	
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum	26.803.290.614,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.250.460.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.250.460.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.250.460.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.552.830.614,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.703.599.035,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.362.693.435,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	340.905.600,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.181.951.960,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.999.960,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	836.940.000,00	

4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.000.012.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.224.250.000,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.748.900.000,00	
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.475.350.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.060.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.134.060.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.093.580.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.488.580.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.000.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	490.000.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	758.942.619,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	558.942.619,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.657.451.000,00	
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.657.451.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	753.996.000,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	753.996.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	999.999.950,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.680.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.680.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.790.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		

1	2	3	4
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.290.000,00	
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.500.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.091.250,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.906.500,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.689.750,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.495.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	217.075.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.075.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.310.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.310.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.753.700,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.290.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.950.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.700,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	553.300.000,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	196.300.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	357.000.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi	750.000.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	40.680.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.680.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.608.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.608.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.500.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.190.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.190.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	493.022.000,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	195.702.000,00	
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	136.000.000,00	
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100.000.000,00	
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	61.320.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1.347.878.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	777.878.000,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	150.000.000,00	
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	150.000.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	627.878.000,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	347.878.000,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	180.000.000,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	570.000.000,00	

4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46.920.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.000.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.580.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.000.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.580.000,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	13.597.000,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.597.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.597.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	27.469.082.333,00	

4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	27.469.082.333,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.436.228.500,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	199.492.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	199.492.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	906.124.500,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	100.022.500,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100.000.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	320.902.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	385.200.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	200.000.000,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50.000.000,00	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50.000.000,00	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.000.000,00	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.000.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.882.998.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	925.200.000,00	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	540.000.000,00	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	417.798.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.905.500.000,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	100.400.000,00	

4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	4.805.100.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100.125.000,00	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	100.125.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	2.241.989.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.498.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	126.419.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	616.650.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.064.453.833,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.431.937.743,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.132.021.743,00	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	299.916.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.098.140,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.498.140,00	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.600.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.870.000,00	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	336.870.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.099.977.950,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.930.397.950,00	

4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	169.580.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	3.947.970.000,00	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	682.590.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	264.800.000,00	
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	3.000.580.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	5.376.134.479,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.376.134.479,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.115.380.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.227.500,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	90.180.000,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	515.580.000,00	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	465.590.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	148.804.000,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	64.514.000,00	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.681.000,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.333.000,00	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000,00	
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34.290.000,00	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	7.290.000,00	

5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.000.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.000.000,00	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000,00	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.111.950.479,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.239.875.479,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.984.035.479,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	188.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	66.960.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.825.000,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.751.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.280.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.280.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.036.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	104.796.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.115.380.000,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	478.572.500,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	478.572.500,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.227.500,00	

5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	31.047.500,00	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	515.580.000,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	49.990.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	148.804.000,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	64.514.000,00	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	8.500.000,00	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8.500.000,00	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	34.290.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8.500.000,00	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	50.000.000,00	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.000.000,00	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.111.950.479,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	153.854.000,00	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	153.854.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.825.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.552.000,00	

5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	353.522.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.080.000,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.080.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.280.000,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.036.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.240.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	175.481.302.775,00	
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	175.481.302.775,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	165.978.033.450,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	168.675.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	22.696.250,00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	26.396.000,00	
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	24.000.000,00	
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	29.396.000,00	
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.556.500,00	
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	31.630.250,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	168.497.250,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	33.420.000,00	
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	39.420.000,00	
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	29.174.000,00	

5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	66.483.250,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	136.275.000,00	
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43.650.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	32.625.000,00	
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60.000.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	165.504.586.200,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	163.333.863.700,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1.170.722.500,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	168.428.300,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	168.428.300,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	28.606.250,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	25.000.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	27.436.500,00	
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	28.450.250,00	
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	58.935.300,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	314.200.160,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	314.200.160,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29.237.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	34.999.910,00	

5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	28.245.000,00	
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	175.000.000,00	
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	23.718.250,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.020.640.865,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.446.509.474,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.613.509.474,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.809.000.000,00	
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.923.925,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.499.925,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.997.250,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.495.750,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	55.980.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.951.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.999.966,00	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	

5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	24.999.966,00	
5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.490.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.495.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.995.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.717.500,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.730.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.997.500,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	88.827.742.504,00	
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	88.827.742.504,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.285.244.750,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.490.195.500,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.490.195.500,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	322.041.250,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	115.080.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	206.961.250,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	380.379.000,00	
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	380.379.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	92.629.000,00	

5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	92.629.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.542.497.754,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	86.112.752.754,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.143.952.754,00	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.968.800.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.260.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.131.000,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.459.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.670.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.545.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.045.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.940.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.940.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	397.985.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	397.985.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	397.985.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	397.985.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.500.000.000,00	
5.01.5.05.1.03.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.500.000.000,00	

5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.500.000.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	750.000.000,00	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	500.000.000,00	
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	250.000.000,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	250.000.000,00	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	250.000.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	500.000.000,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	500.000.000,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	2.574.154.928,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.574.154.928,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	316.190.000,00	
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	115.795.000,00	
5.06.02.2.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	25.500.000,00	
5.06.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	90.295.000,00	
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	140.895.000,00	
5.06.02.2.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30.430.000,00	
5.06.02.2.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	30.430.000,00	
5.06.02.2.02.0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	80.035.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	59.500.000,00	

5.06.02.2.03.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	59.500.000,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.346.561.928,00	
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.200.777.481,00	
5.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.113.057.481,00	
5.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.720.000,00	
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528.022.510,00	
5.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.549.250,00	
5.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.863.750,00	
5.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.743.510,00	
5.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	449.866.000,00	
5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.146.237,00	
5.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	278.858.435,00	
5.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	60.896.922,00	
5.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.390.880,00	
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.620.000,00	
5.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
5.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.620.000,00	
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.398.700,00	
5.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.140.000,00	
5.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	
5.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.258.700,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		

1	2	3	4
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	5.549.320.187,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	5.549.320.187,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.531.539.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.285.314.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43.260.000,00	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	446.825.000,00	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	104.290.000,00	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	39.400.000,00	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	494.200.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	157.339.000,00	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	246.225.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	246.225.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.017.781.187,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.663.530.492,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.572.830.492,00	
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.700.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.800.000,00	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	84.800.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.100.695,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.344.500,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.529.820,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN	

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.810.375,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.416.000,00	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.610.000,00	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.610.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.700.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.200.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.040.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.790.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.250.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	21.194.637.427,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Malaka Tengah	1.788.070.234,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25.000.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	136.280.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	136.280.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.280.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.546.790.234,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.334.990.234,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.288.070.234,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.430.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.350.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.580.000,00	

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.830.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.830.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.540.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.540.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Malaka Timur	1.700.508.601,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	53.770.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.770.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.200.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.570.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.200.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.200.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.200.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	119.450.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	119.450.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	85.250.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.200.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	84.500.000,00	

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.500.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	19.500.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.432.588.601,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.115.908.743,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.068.988.743,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.854.250,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.671.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.883.250,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.300.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.980.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.980.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.060.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.560.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.785.608,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.190.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.595.608,00	

7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Kobalima	1.644.312.375,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	75.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	75.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	25.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.990.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.990.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.000.000,00	

7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.990.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	22.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.456.322.375,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.284.343.965,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.144.423.965,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.520.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.120.000,00	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.900.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.458.410,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.460.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.998.410,00	

7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kobalima Timur	1.565.416.114,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.019.750,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.019.750,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	66.720.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	27.299.750,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.400.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	31.700.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	21.800.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.900.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.370.996.364,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.112.336.192,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.065.416.192,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.326.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.006.700,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.320.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.190.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.190.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.990.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.990.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.153.472,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.710.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.443.472,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Io Kufeu	1.459.331.986,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.950.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	43.950.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.750.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	26.200.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.900.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.900.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.900.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	34.080.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	34.080.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	34.080.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.000.000,00	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.265.401.986,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.030.521.050,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	959.481.050,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	71.040.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.845.900,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.716.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.330.000,00	

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.900,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.800.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.020.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.520.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.015.036,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.710.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.305.036,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Botin Leobebe	1.498.081.584,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	19.995.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.995.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	19.995.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	53.720.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20.060.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.060.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	33.660.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	33.660.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	30.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30.000.000,00	

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	30.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	80.070.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	80.070.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.990.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24.990.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	30.090.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.284.296.584,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	899.401.603,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.481.603,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	160.641.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.950.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.002.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.749.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.940.000,00	

7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.203.481,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.203.481,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.050.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.050.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Laenmanen	1.676.207.126,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.950.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.002.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.749.000,00	

7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.940.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.203.481,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.203.481,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.050.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.050.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Laenmanen	1.676.207.126,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	10.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000,00	

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	30.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	30.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.500.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.500.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.551.207.126,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.337.157.356,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.290.237.356,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.550.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.999.770,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.799.770,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			

1	2	3	4
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.200.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Sasitamean	1.597.073.091,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	70.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	149.773.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	149.773.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.740.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	31.190.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN	

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEMENTARA (Rp)	KET
1	2	3	4
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	46.843.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.327.300.091,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000,00	
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	850.000,00	
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.700.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.147.073.291,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.097.073.291,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.476.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.134.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.342.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Malaka Barat	2.248.139.244,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9.860.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.860.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.860.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.990.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.990.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.990.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	68.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	68.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.200.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	20.230.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.450.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	23.120.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.085.289.244,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.825.640.244,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.778.720.244,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.920.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.720.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.720.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.500.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.429.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.340.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.089.000,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Weliman	2.214.620.304,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	59.990.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	24.990.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	24.990.000,00	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.630.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.500.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.500.000,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100.130.000,00	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	24.990.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	25.160.000,00	
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	49.980.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.990.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.990.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.990.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	74.990.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	74.990.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.990.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	24.990.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.990.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.990.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.907.030.304,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.663.260.721,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.488.140.721,00	

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.920.000,00	
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.864.583,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.864.583,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.370.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	6.290.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.080.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.545.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.545.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	24.990.000,00	
7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.990.000,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rinhat	2.212.753.222,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.000.000,00	

7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	58.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.500.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	58.500.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.000.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.000.000,00	
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	25.000.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.000.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.012.253.222,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.599.403.342,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.551.283.342,00	

7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.120.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.998.560,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.998.560,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.742.040,00	
7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.743.790,00	
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.998.250,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.500.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.609.280,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.610.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.999.280,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Wewiku	1.590.123.546,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	44.540.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.540.000,00	

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24.820.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.720.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	24.820.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	24.820.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.820.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.720.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.720.000,00	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45.000.000,00	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.720.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	98.770.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.770.000,00	
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.720.000,00	
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9.860.000,00	
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	34.850.000,00	
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24.480.000,00	
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.860.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.307.273.546,00	

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.153.991.696,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.090.123.546,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.868.150,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.791.850,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.997.850,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.794.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.590.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.590.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.900.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.400.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.679.123.454,00	
8.01.2.19.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.679.123.454,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	444.359.428,00	

8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	444.359.428,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	444.359.428,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	69.000.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	69.000.000,00	
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	69.000.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	152.250.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	152.250.000,00	
8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	152.250.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	355.500.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	355.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24.480.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	331.020.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.658.014.026,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.251.339.256,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.178.019.256,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	73.320.000,00	

8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.298.210,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	980.000,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.714.210,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.604.000,00	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.440.000,00	
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.440.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.936.560,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.720.000,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.716.560,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
X	NON URUSAN		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	394.686.250,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	7.500.000,00	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.020.000,00	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	

2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	270.586.250,00	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.274.782.145,00	
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.586.250,00	
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	31.600.000,00	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.098.140,00	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.600.000,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	75.000.000,00	
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.398.700,00	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	

4.2 Plafon Anggaran Sementara Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Jenis Belanja Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	330.726.719.210,00
	Belanja Barang dan Jasa	194.886.951.818,00
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	0,00
	Belanja Hibah	2.110.977.428,00
	Belanja Bantuan Sosial	280.000.000,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.139.208.731,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.550.850.000,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.576.169.716,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
	Belanja Modal Aset Lainnya	86.400.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	1.170.722.500,00
	Belanja Bantuan Keuangan	163.333.863.700,00

BAB V

PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dari belanja lain-lain yang diprediksi tidak terealisasi sebesar 7,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat digunakan untuk membiayai defisit atau selisih kurang antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah sebesar **Rp.57.181.942.091** dan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Bank NTT Cabang Betun sebesar **Rp1.000.000.000**.

Secara rinci pada tabel berikut akan digambarkan target penerimaan pembiayaan daerah dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.181.942.091,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.181.942.091,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	57.181.942.091,00	

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	
	Pembiayaan Netto	56.181.942.091,00	

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malaka
Selaku Pihak Kedua,



Adrianus Bria Seran, S.H
Ketua DPRD Kabupaten Malaka

Betun, 3 September 2024
Bupati Malaka
Selaku Pihak Pertama



DR. Simon Nahak, SH



Hendrikus Fahik Taek, S.H.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka